

Masyarakat Madani

▪ Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat

P-ISSN: 2338-607X I E-ISSN: 2656-7741

PENDAMPING SOSIAL: KUNCI SUKSES BPNT BUNGARAYA

Tri Indah Epril Lilawati, Darusman, Yulia Annisa

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

E-Mail: yulia.annisa@uin-suska.ac.id

Abstrak

Peran pendamping sosial dalam Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) memiliki kontribusi penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program, meskipun dihadapkan pada kendala seperti keterbatasan akses data, birokrasi yang kompleks, dan evaluasi yang belum berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pendamping sosial dalam mendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping sosial berperan strategis dalam tiga tahap: pendekatan awal, pengembangan komitmen, dan pemantapan hubungan. Peran ini mencerminkan fungsi fasilitator sosial dalam proses pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman peran pendamping sosial sebagai agen perubahan dalam program kesejahteraan sosial.

Kata kunci: *Pendamping Sosial, BPNT, Pemberdayaan Masyarakat, Fasilitator Sosial, KPM*

Abstract

The role of social facilitators in the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) significantly contributes to the smooth implementation of the program, despite challenges such as limited data access, complex bureaucracy, and unsustainable evaluation. This study aims to describe the role of social facilitators in assisting Beneficiary Families (KPM) in Bunga Raya District, Siak Regency. This research uses a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. The data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that social facilitators play a strategic role in three stages: initial approach, commitment development, and relationship strengthening. This role reflects the function of social facilitators in the community empowerment process. The study contributes to understanding social facilitators as agents of change in social welfare programs.

Keywords: *Social Facilitator, BPNT, Community Empowerment, Social Welfare, Beneficiary families*

Pendahuluan

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu pilar utama dalam kebijakan perlindungan sosial berbasis pangan di Indonesia. Dirancang untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga miskin, program ini tidak hanya menysasar aspek distribusi bantuan, tetapi juga berupaya menumbuhkan kemandirian dan literasi sosial masyarakat. Dalam konteks pelaksanaannya BPNT memiliki Pendamping sosial yang berperan strategis dalam memastikan program berjalan sesuai dengan prinsip keberpihakan dan ketepatan sasaran. Tidak hanya bertugas pada aspek administratif, peran krusial sebagai penghubung antara kebijakan negara dan dinamika keseharian masyarakat penerima manfaat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa peran ini belum sepenuhnya optimal dan seringkali terjebak dalam rutinitas administratif semata.

Di tengah semangat transformasi sosial, pendamping sosial semestinya tidak hanya hadir sebagai pelaksana teknis, melainkan juga sebagai agen perubahan yang mampu mendorong partisipasi, membangun kesadaran kritis, dan menciptakan relasi sosial yang setara antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks pemberdayaan sosial, peran semacam ini tidak terlepas dari dinamika relasi, keterlibatan aktif, dan kemampuan membangun komitmen bersama, yang pada akhirnya menempatkan pendamping sebagai bagian dari proses transformasi sosial yang lebih luas. Sayangnya, di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, implementasi program BPNT masih menghadapi persoalan mendasar yang mencerminkan lemahnya fungsi pendampingan mulai dari minimnya keterbukaan data, ketidakteraturan jadwal penyaluran, hingga absennya pendamping di sejumlah desa, sehingga efektivitas peran tersebut masih menjadi persoalan di berbagai daerah. wawancara terhadap pendamping (16 Januari 2025), ditemukan fakta bahwa ketiadaan daftar penerima bantuan yang dapat diakses secara terbuka mengharuskan warga mengecek status mereka secara manual ke agen e-warong. Kondisi ini menyulitkan terutama bagi warga lanjut usia atau yang memiliki keterbatasan mobilitas. Selain itu, frekuensi kehadiran pendamping juga tidak merata antar desa. Di desa yang menggunakan sistem paketan sembako, pendamping aktif mendampingi kegiatan penyaluran, namun di desa lain yang menggunakan sistem non-paketan, kehadiran pendamping cenderung minim.

Masalah lainnya mencakup tidak konsistennan jadwal penyaluran bantuan yang sering kali meleset dari ketentuan, bahkan mengalami keterlambatan hingga dua hingga tiga bulan. Hal ini tentu berdampak terhadap perencanaan konsumsi rumah tangga KPM yang sangat bergantung pada bantuan tersebut. Tidak sedikit pula warga yang mengeluhkan

penghapusan nama mereka dari daftar penerima secara sepihak tanpa adanya sosialisasi atau verifikasi. Padahal, menurut mereka, kondisi ekonomi belum banyak berubah. Lambatnya proses perubahan data dan cakupan wilayah kerja yang luas juga menyebabkan pendamping mengalami kesulitan dalam melaksanakan peran secara menyeluruh.

Secara ideal, pendamping sosial tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga edukatif, persuasif, dan transformatif (Mardikanto & Soebiato, 2017). Untuk memahami peran ini secara lebih mendalam, digunakan teori perubahan yang dikembangkan oleh Lewin (1947), yang membagi proses perubahan menjadi tiga tahap: unfreezing (pencairan hubungan), changing (penggerakan perubahan), dan refreezing (pemantapan hubungan baru) (Mardikanto & Soebiato, 2017). Teori ini kemudian dikembangkan secara operasional oleh Lippitt et al. (1958), ke dalam tiga indikator utama dengan sebelas subindikator konkret (Mardikanto & Soebiato, 2017). Lebih lanjut, Mardikanto dan Soebiato menegaskan bahwa fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memposisikan diri sebagai mitra kritis masyarakat, bukan sekadar pelaksana program. Fasilitator harus mampu mengenali karakteristik penerima manfaat, memahami potensi lokal, dan membangun relasi horizontal yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pemberdayaan (Haris, 2019).

Fakta-fakta tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara desain ideal program dan praktik lapangan. Hal ini mempertegas perlunya pendekatan analitis yang tidak hanya mengukur efektivitas program, tetapi juga mengeksplorasi peran transformatif pendamping sosial sebagai katalis perubahan. Dalam kerangka ini, penelitian ini berupaya mengangkat novelty berupa penguatan fungsi pendamping melalui perspektif teori perubahan sosial Kurt Lewin yang dikembangkan oleh Lippitt, yang belum banyak digunakan dalam evaluasi program sosial berskala lokal. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak sekadar mendeskripsikan kinerja pendamping sosial, tetapi juga membongkar dinamika relasi, motivasi, dan strategi adaptasi yang dijalankan dalam menghadapi kompleksitas sosial penerima manfaat. Penelitian ini penting untuk memperluas pemahaman tentang bagaimana aktor lokal seperti pendamping sosial dapat menjadi lokomotif transformasi sosial dalam program perlindungan sosial yang bersifat massif dan struktural seperti BPNT.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam peran pendamping sosial dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak. Pendekatan ini dipilih karena sesuai

dengan tujuan penelitian yang berfokus pada pemaknaan terhadap fenomena sosial dari perspektif subjek yang terlibat secara langsung (Creswell & Poth, 2016). Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive, yakni Kecamatan Bungaraya, yang meliputi Desa Jati Baru, Desa Kemuning Muda, dan Desa Buntan Lestari. Ketiga desa ini merepresentasikan keragaman model implementasi BPNT, baik dari aspek geografis, sosial-ekonomi, hingga dinamika pelibatan pendamping sosial.

Data primer diperoleh melalui Wawancara mendalam dengan informan kunci yang dipilih melalui teknik purposive sampling, yaitu pendamping sosial BPNT, KPM, agen e-warong, dan perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Siak. Observasi partisipatif dilakukan di lokasi distribusi untuk mengamati praktik lapangan secara langsung. Dokumentasi terhadap arsip, foto kegiatan, dan dokumen pelaksanaan program. Data sekunder mencakup dokumen kebijakan, laporan resmi, serta publikasi relevan yang mendukung konteks dan analisis. Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi (Denzin, 2008), yang mencakup triangulasi sumber, metode, dan teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai aktor kunci. Triangulasi metode dilakukan melalui kombinasi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun triangulasi teori dilakukan melalui penguatan kerangka berpikir menggunakan teori perubahan sosial dari Kurt Lewin dan Ronald Lippitt, serta teori pemberdayaan masyarakat dari Mardikanto & Soebiato.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman melalui tiga tahapan: (1) Reduksi data, yaitu seleksi dan penyederhanaan data mentah yang relevan dengan fokus penelitian; (2) Penyajian data, dalam bentuk narasi tematik dan visualisasi tabel untuk mempermudah identifikasi pola; dan (3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi, dilakukan secara berkelanjutan dan reflektif untuk memastikan interpretasi yang konsisten dengan konteks sosial yang diteliti. Seluruh tahapan analisis dilakukan secara simultan dan bersifat iteratif, guna memperoleh pemahaman holistik terhadap kompleksitas peran pendamping sosial sebagai aktor strategis dalam proses transformasi sosial melalui program perlindungan sosial (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024).

Hasil dan Pembahasan

A. Pendekatan Awal.

Pendekatan awal merupakan tahap fundamental dalam proses fasilitasi perubahan sosial, di mana orientasi utama terletak pada membangun kesadaran kolektif masyarakat akan kebutuhan mendesak untuk berubah. Lewin (1947) menyebut tahap ini sebagai

unfreezing, yaitu proses mencairkan pola pikir lama, mengganggu zona nyaman, dan membuka ruang bagi munculnya kesadaran baru yang lebih adaptif. Dalam pandangan Lewin, tanpa melalui proses unfreezing, intervensi sosial cenderung hanya menyentuh aspek permukaan tanpa menghasilkan perubahan yang berarti.

Lippitt et al. (1958) kemudian memperluas konsep Lewin dengan menekankan peran fasilitator dalam tahap awal. Menurutnya, fasilitator tidak hanya berfungsi sebagai penggerak teknis, melainkan sebagai katalis yang mampu membaca situasi, memahami dinamika motivasi masyarakat, dan menghubungkan sumber daya agar transformasi sosial dapat berlangsung lebih efektif. Ia merumuskan lima peran utama fasilitator dalam tahap awal: (1) melakukan diagnosa kebutuhan nyata, (2) menganalisis motivasi dan kapasitas masyarakat, (3) memilih objek perubahan yang strategis, (4) mengidentifikasi sumber daya lokal, dan (5) menentukan bentuk bantuan yang paling tepat. Dalam konteks Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kecamatan Bungaraya, kelima peran ini tampak dijalankan secara bervariasi oleh pendamping sosial. Namun, terdapat pula keterbatasan yang memperlihatkan tantangan metodologis maupun struktural dalam implementasinya. Berikut uraian mendalam setiap poin.

1. Diagnosa Masalah atau Kebutuhan Nyata.

Langkah pertama yang ditempuh pendamping sosial adalah melakukan verifikasi data dan observasi lapangan untuk memastikan akurasi penerima manfaat. Misalnya, mereka menemukan kasus data ganda, identitas tidak sesuai, serta perbedaan status kependudukan yang menghambat kelancaran penyaluran. Diagnosa ini penting karena menyangkut legitimasi program dan ketepatan sasaran. Namun, jika ditelaah lebih jauh, diagnosa yang dilakukan masih bersifat administratif. Fokusnya terletak pada pemenuhan prosedur birokratis, bukan pada dimensi sosial-psikologis yang lebih dalam. Sebagai contoh, tidak banyak upaya untuk memahami bagaimana persepsi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap bantuan, bagaimana bantuan memengaruhi relasi sosial dalam komunitas, atau bagaimana ketergantungan terhadap program dapat membentuk pola pikir baru.

Dari perspektif teori perubahan sosial, keterbatasan ini berarti proses unfreezing belum sepenuhnya optimal. Kesadaran KPM mengenai perlunya perubahan belum benar-benar ditumbuhkan, melainkan hanya diarahkan pada kepatuhan terhadap sistem yang ada. Padahal, menurut Lippitt, diagnosa yang komprehensif seharusnya mencakup dimensi faktual, struktural, dan psikologis agar

perubahan tidak berhenti pada level administratif.

2. Analisis Motivasi dan Kemampuan Masyarakat untuk Berubah.

Pendamping sosial juga berhadapan dengan resistensi masyarakat, terutama ketika data penerima manfaat dinyatakan tidak valid. Dalam situasi ini, mereka melakukan pendekatan persuasif dengan cara berdialog, menjelaskan prosedur, serta memberi pengertian bahwa data harus diperbarui agar bantuan dapat tersalurkan dengan tepat. Pendekatan ini mencerminkan adanya sensitivitas humanis, karena pendamping tidak hanya mengandalkan instruksi top-down, melainkan berusaha memahami keresahan masyarakat. Namun, jika dibandingkan dengan gagasan Lippitt, strategi tersebut masih sebatas penanganan konflik jangka pendek. Belum ada mekanisme sistematis untuk mendorong partisipasi warga dalam merumuskan motivasi bersama atau membangun kapasitas jangka panjang melalui refleksi kolektif. Dalam kerangka perubahan sosial, motivasi masyarakat adalah energi utama yang menggerakkan transformasi. Tanpa motivasi yang terinternalisasi, penerima manfaat akan tetap bersikap pasif dan bergantung pada instruksi. Oleh karena itu, analisis motivasi seharusnya tidak hanya mengatasi resistensi sesaat, tetapi juga diarahkan pada pembentukan kesadaran kritis (*critical consciousness*) mengenai hak, kewajiban, dan potensi yang dimiliki masyarakat.

3. Pemilihan Objek Perubahan yang Tepat.

Menurut Lippitt, fasilitator perlu menentukan objek perubahan strategis yang mampu menghasilkan efek domino dalam komunitas. Objek perubahan tidak hanya soal aspek teknis, tetapi juga mencakup pola interaksi sosial, norma, dan struktur yang menopang kehidupan masyarakat. Dalam implementasi BPNT di Bungaraya, belum tampak adanya kesadaran pendamping untuk memilih objek perubahan secara strategis. Kegiatan lebih diarahkan pada eksekusi teknis program, seperti memastikan distribusi kartu dan validasi data, yang bersifat top-down dari kebijakan pusat. Dengan kata lain, pendamping menjalankan fungsi administratif ketimbang fungsi transformasional.

Keterbatasan ini sejalan dengan kritik Mardikanto & Soebiato (2017), menyebut bahwa banyak program pemberdayaan di Indonesia hanya menekankan pada output administratif, bukan pada perubahan sosial yang substantif. Akibatnya, peluang untuk menjadikan program sebagai motor perubahan lokal seringkali terabaikan. Jika pendamping mampu mengidentifikasi objek perubahan strategis,

misalnya memperkuat solidaritas antar-KPM atau mengembangkan koperasi pangan lokal, maka keberlanjutan program akan lebih terjamin.

4. Analisis Sumber Daya yang Tersedia dan Dapat Digunakan.

Meskipun terdapat keterbatasan dalam memilih objek perubahan, pendamping menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam memetakan sumber daya lokal. Mereka menjalin kolaborasi dengan perangkat desa, lembaga penyalur, dan sistem informasi kesejahteraan sosial (SIKS-NG). Dalam hal ini, pendamping berperan sebagai jembatan antaraktor kelembagaan, yang memungkinkan terjadinya koordinasi lintas sektor. Penggunaan sumber daya lokal sangat penting karena mencerminkan prinsip *community assets-based development*, yaitu memanfaatkan kekuatan yang sudah ada di masyarakat ketimbang hanya mengandalkan intervensi eksternal. Dengan menghubungkan KPM ke perangkat desa dan sistem kelembagaan lain, pendamping membantu membangun jejaring sosial yang menjadi modal penting bagi keberlanjutan program.

Namun, analisis sumber daya ini masih terbatas pada aspek kelembagaan formal. Belum banyak upaya untuk menggali modal sosial informal, seperti gotong royong, jaringan kerabat, atau inisiatif lokal yang mungkin dapat mendukung efektivitas program. Padahal, dalam masyarakat pedesaan seperti Bungaraya, modal sosial informal seringkali menjadi pilar utama solidaritas dan keberlangsungan hidup.

5. Pemilihan Bentuk Bantuan yang Paling Tepat.

Pendamping sosial memiliki peran strategis dalam memastikan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), khususnya kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, maupun keluarga miskin ekstrem. Dalam praktiknya, pendamping berupaya menyesuaikan bentuk bantuan agar tidak menambah beban bagi penerima. Contohnya, untuk lansia atau penyandang disabilitas yang kesulitan hadir ke titik distribusi, pendamping melakukan layanan kunjungan langsung ke rumah. Hal ini mencerminkan adanya sensitivitas sosial sekaligus adaptabilitas dalam merespons kondisi nyata masyarakat. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – *Next Generation* (SIKS-NG) juga menjadi langkah penting. Sistem ini digunakan pendamping untuk mengelola data penerima, melaporkan hasil distribusi, serta memastikan informasi yang tersaji lebih akurat dan transparan.

Dengan begitu, praktik pendampingan tidak hanya berbasis manual, tetapi juga mengikuti perkembangan digital yang mendukung efektivitas kerja.

Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip fasilitasi yang dijelaskan Lippitt, yaitu pentingnya menyesuaikan intervensi dengan kondisi spesifik komunitas. Namun, di balik keberhasilan adaptasi ini, masih terdapat tantangan serius. Jika bantuan hanya ditempatkan pada aspek charity-oriented, maka risiko munculnya ketergantungan sosial akan semakin tinggi. Untuk itu, pendamping tidak hanya berhenti pada pemberian bantuan sesaat, melainkan perlu mengintegrasikannya dengan pendekatan pemberdayaan. Beberapa strategi yang dapat dikembangkan antara lain memberikan edukasi literasi pangan agar keluarga mampu mengatur konsumsi sehat, menghubungkan KPM dengan peluang usaha mikro untuk menambah pendapatan, hingga menciptakan mekanisme pengelolaan bersama berbasis komunitas. Dengan demikian, bantuan tidak sekadar memenuhi kebutuhan jangka pendek, melainkan juga menjadi sarana menuju kemandirian dan keberlanjutan kesejahteraan masyarakat.

B. Analisis Peran Penggerakan Perubahan.

1. Menjalin Hubungan yang Akrab dengan KPM

Dalam kerangka Lippitt et al. (1958), tahap awal proses perubahan sosial menekankan pentingnya membangun kedekatan emosional dan sosial antara fasilitator dengan masyarakat. Hal ini terlihat jelas di Kecamatan Bungaraya, di mana pendamping sosial berhasil membangun hubungan akrab, baik dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) maupun agen e-Warong sebagai simpul utama distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Kedekatan ini tidak sekadar hubungan personal, melainkan telah berkembang menjadi bentuk modal sosial (social capital) yang memperkuat posisi pendamping sebagai rujukan utama informasi terkait bantuan. Kepercayaan yang diberikan agen e-Warong terhadap pendamping memperlihatkan adanya posisi strategis pendamping dalam jaringan koordinasi lokal. Posisi ini berperan penting karena e-Warong bukan hanya saluran distribusi, tetapi juga representasi keterhubungan antara kebijakan program dan penerima manfaat. Relasi harmonis tersebut meminimalkan potensi konflik, meningkatkan efisiensi distribusi, serta menciptakan rasa aman bagi penerima bantuan. Dengan demikian, pendamping sosial bukan hanya bertindak sebagai penyampai kebijakan, tetapi juga mediator yang menjaga stabilitas sosial di tingkat akar rumput.

Namun demikian, temuan lapangan juga memperlihatkan keterbatasan, yaitu belum optimalnya keterlibatan tokoh-tokoh informal seperti ketua RT, tokoh agama, maupun pemimpin komunitas lokal. Padahal, tokoh informal memiliki legitimasi sosial yang kuat dan pengaruh signifikan dalam membentuk opini serta perilaku masyarakat. Jika jejaring informal ini lebih dilibatkan, pendamping tidak hanya mengandalkan relasi dengan agen formal seperti e-Warong, tetapi juga dapat memperluas basis dukungan sosial dan memperkuat keberlanjutan perubahan (Laksana et al., 2025). Dengan kata lain, modal sosial yang dimiliki pendamping masih perlu diperluas agar transformasi sosial yang diupayakan menjadi lebih kokoh dan berakar dalam kehidupan masyarakat Bungaraya.

2. Menumbuhkan Kesadaran Akan Masalah dan Kebutuhan Tersembunyi

Salah satu temuan penting adalah bagaimana pendamping sosial di Kecamatan Bungaraya menjalankan peran sebagai penyadar sosial (*social conscientizer*). Mereka berupaya memberikan edukasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengenai hak-hak dasar yang melekat pada penerima bantuan, kualitas bantuan yang seharusnya diterima, serta pentingnya distribusi yang adil. Upaya ini memiliki relevansi dengan gagasan Freire (1970) tentang *conscientization* (penyadaran kritis). Menurut Freire, penyadaran kritis adalah proses di mana masyarakat didorong untuk melihat realitas sosial secara lebih mendalam, memahami adanya ketidakadilan struktural, dan memiliki keberanian untuk melakukan tindakan transformatif. Dalam konteks BPNT, idealnya penyadaran berarti membantu KPM menyadari bahwa ketidakadilan dalam distribusi bantuan bukan hanya persoalan teknis, tetapi bagian dari struktur sosial yang lebih luas, yang membutuhkan kontrol sosial dan partisipasi aktif dari warga.

Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa peran penyadaran ini lebih banyak berhenti pada edukasi teknis. Pendamping lebih sering memberikan arahan mengenai prosedur penyaluran bantuan, cara menggunakan kartu, atau mekanisme pencairan. Dengan demikian, penyadaran kritis yang dimaksud Freire belum sepenuhnya terwujud. KPM belum dilibatkan dalam dialog reflektif mengenai hakikat program, posisi mereka dalam struktur sosial, atau strategi memperjuangkan keadilan distribusi.

Dari perspektif Freire, pendamping sosial di Bungaraya baru berada pada tahap *narration sickness*, yaitu cenderung menyampaikan instruksi atau pengetahuan satu arah. Proses penyadaran kritis yang idealnya berbasis dialog horizontal belum sepenuhnya terjadi. KPM diposisikan sebagai penerima pengetahuan, bukan pencipta pengetahuan.

Kesenjangan antara tujuan ideal penyadaran dengan praktik lapangan terlihat jelas dalam masa transisi dari bantuan barang ke bantuan tunai. Pergeseran ini seharusnya menjadi momentum penting untuk membuka ruang dialog, membangkitkan kesadaran kritis, serta memperkuat kemandirian KPM. Namun, dalam praktiknya, pendamping kurang memberikan pendampingan intensif bagi kelompok rentan, terutama lansia, penyandang disabilitas, dan rumah tangga dengan keterbatasan literasi digital.

Akibatnya, proses penyadaran sosial berlangsung tidak merata. Sebagian KPM tetap berada dalam posisi pasif, hanya menunggu instruksi dari pendamping, dan tidak berusaha memahami hak atau kewajiban mereka secara lebih mendalam. Situasi ini sejalan dengan kritik terhadap banyak program sosial di Indonesia, di mana penerima manfaat sering kali diperlakukan sebagai objek kebijakan, bukan subjek aktif yang mampu menentukan arah perubahan. Tantangan ini juga mengindikasikan bahwa peran pendamping masih sangat dipengaruhi oleh kerangka birokratis. Mereka lebih fokus pada pelaksanaan teknis sesuai aturan kementerian, ketimbang menumbuhkan kesadaran kritis yang bersifat partisipatif. Padahal, menurut Freire, penyadaran tidak dapat tumbuh dari instruksi sepihak, tetapi melalui dialog reflektif yang menempatkan masyarakat sebagai mitra sejajar.

3. Menetapkan Prioritas dan Memimpin Mobilisasi Perubahan

Selain berperan sebagai penyadar, pendamping sosial juga diharapkan mampu bertindak sebagai pemimpin mobilisasi perubahan. Peran ini penting karena transformasi sosial tidak hanya membutuhkan kesadaran, tetapi juga kapasitas untuk memobilisasi sumber daya, menetapkan prioritas, dan menggerakkan aktor lokal agar perubahan bisa terjadi secara nyata. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa peran kepemimpinan pendamping masih berada pada level teknis-administratif. Contohnya di lapangan, mereka memfasilitasi musyawarah desa untuk menentukan mekanisme distribusi bantuan. Hal ini memang menunjukkan adanya fungsi koordinasi, tetapi belum didukung oleh analisis data lokal yang sistematis. Akibatnya, musyawarah sering kali hanya menjadi forum formalitas tanpa menghasilkan strategi jangka panjang.

Dalam kerangka teori perubahan sosial, peran pemimpin mobilisasi seharusnya tidak berhenti pada administratif, melainkan masuk pada tataran strategis-transformatif. Pendamping idealnya mampu mengidentifikasi masalah prioritas, merancang solusi berbasis kebutuhan lokal, serta menghubungkan program dengan potensi ekonomi, sosial, maupun budaya yang ada di komunitas. Tanpa itu, pendamping cenderung hanya

menjadi penyampai kebijakan dari pusat ke daerah.

Temuan lapangan mengidentifikasi tiga hambatan utama yang membatasi kapasitas pendamping sebagai pemimpin mobilisasi:

1. Minimnya pelatihan pendamping.

Banyak pendamping belum dibekali keterampilan analitis maupun kepemimpinan yang memadai. Pelatihan yang ada lebih berfokus pada aspek administratif, seperti penggunaan aplikasi SIKS-NG, dibandingkan pada keterampilan membaca dinamika sosial, melakukan analisis kebutuhan, atau merancang strategi mobilisasi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas pendamping masih berorientasi pada pemenuhan teknis birokratis, bukan pada pengembangan peran strategis sebagai agen perubahan sosial. Sejalan dengan temuan tersebut, sebuah penelitian menegaskan bahwa Program pengembangan kepemimpinan berperan penting dalam membantu para pemimpin menciptakan komunitas yang dinamis dan memiliki keterlibatan yang tinggi. Pengembangan kepemimpinan merupakan kunci agar agen lokal dapat bertransformasi menjadi pemimpin mobilisasi yang mampu membangun partisipasi dan keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan, bukan sekadar pelaksana instruksi teknis (Cleveland & Cleveland, 2018).

2. Lemahnya dokumentasi program.

Dokumentasi sering hanya berupa laporan rutin administratif, tanpa ada catatan mendalam mengenai dinamika sosial yang terjadi di lapangan. Padahal, dokumentasi merupakan instrumen penting untuk melakukan evaluasi berkelanjutan, mengidentifikasi pola masalah, serta menyusun prioritas strategis program pemberdayaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses dokumentasi yang dijalankan para pendamping masih berorientasi pada pemenuhan kewajiban administratif, bukan sebagai sarana refleksi dan pembelajaran sosial. Temuan ini sejalan dengan pandangan dalam literatur yang menyatakan bahwa monitoring, dokumentasi, dan evaluasi merupakan domain kritis dalam membangun kapasitas dan mobilisasi komunitas. Dengan demikian, temuan lapangan ini konsisten dengan teori yang menekankan pentingnya dokumentasi yang mendalam dan reflektif sebagai bagian integral dari upaya memperkuat kapasitas komunitas dan memastikan keberlanjutan program (Liberato et al., 2011).

3. Koordinasi yang terbatas dengan actor lokal.

Hubungan pendamping dengan e-Warong, perangkat desa, maupun lembaga masyarakat lainnya belum berjalan optimal. Akibatnya, mobilisasi sumber daya di tingkat lokal cenderung parsial dan kurang terintegrasi. Padahal, kolaborasi lintas aktor merupakan faktor kunci dalam menciptakan perubahan sosial yang lebih luas dan berkelanjutan. Kondisi ini menggambarkan bahwa proses koordinasi antar pemangku kepentingan belum sepenuhnya mendukung prinsip kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan pandangan literatur yang menegaskan pentingnya *linkages* dan *partnerships* sebagai salah satu domain utama dalam penguatan kapasitas komunitas (Liberato et al., 2011). Dengan demikian, kolaborasi lintas-aktor merupakan fondasi penting bagi mobilisasi sosial yang efektif dan berorientasi pada keberlanjutan.

Hambatan-hambatan ini menjelaskan mengapa pendamping lebih sering tampil sebagai pelaksana teknis daripada pemimpin perubahan. Tanpa penguatan kapasitas, mereka akan tetap berada dalam bayang-bayang instruksi birokratis, bukan sebagai agen transformatif yang mandiri.

C. Analisis Peran Pemantapan Hubungan.

Pemantapan hubungan menjadi tahap krusial dalam proses perubahan sosial sebagaimana diteorikan oleh (Lewin, 1947) melalui konsep *refreezing*, yakni penguatan nilai-nilai baru agar perubahan dapat berkelanjutan. Dalam hal ini, fasilitator harus menjalin kerja sama yang kuat, merancang transformasi jangka panjang secara kolaboratif, dan menyumbangkan gagasan berdasarkan refleksi lapangan (Lippitt et al., 1958).

1. Aspek kerja sama dengan KPM dan tokoh formal-informal.

Konsep *refreezing* dari Lewin (1943) menekankan pentingnya melembagakan perubahan agar tidak kembali ke pola lama. Di Bungaraya, pendamping sosial sudah menjalin kerja sama dengan lembaga formal, seperti Dinas Sosial dan bank penyalur. Kerja sama ini penting dalam menjaga akuntabilitas distribusi. Namun, pola kerja sama tersebut masih bersifat administratif dan belum menyentuh jejaring sosial yang lebih luas. Tokoh adat, ketua RT, maupun pemuka agama belum dilibatkan secara aktif, padahal mereka memiliki pengaruh simbolik dan kultural dalam mengarahkan opini masyarakat. Ketidakterlibatan mereka menunjukkan lemahnya pendekatan horizontal, sehingga relasi yang terbangun belum cukup kokoh untuk menopang perubahan jangka panjang.

Studi tentang *Multi-Sector Collaboration in Community Empowerment* menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan pemberdayaan (Lestari et al., 2024). Hal ini sejalan dengan temuan bahwa dalam jaringan kolaboratif Lembaga formal maupun non formal (elit lokal) punya peran sebagai agen perubahan, fasilitator, mediator dan penggerak partisipasi masyarakat (Polko et al., 2025; Tarom & Aksuo, 2025). Tanpa keterlibatan tokoh adat/pemuka agama/ketua RT, bisa terjadi kegagalan dalam tahap *refreezing* karena nilai dan norma sosial lama masih mendominasi, dan komunitas belum merasakan perubahan sebagai milik mereka. Maka, untuk memperkuat tahap pemantapan hubungan (*refreezing*), perlu strategi: memperluas jejaring horizontal, melibatkan tokoh informal sebagai agent of change, dan membangun relasi yang bersifat partisipatif bukan hanya administratif.

2. Perancangan tahap perubahan yang berkelanjutan.

Pendamping sosial di Bungaraya telah menunjukkan kesadaran reflektif terhadap berbagai kelemahan penyaluran, misalnya keterlambatan bantuan atau kurangnya informasi bagi KPM. Akan tetapi, kapasitas mereka untuk menyusun strategi berkelanjutan masih terhambat oleh: 1) Koordinasi top-down yang membatasi inisiatif lokal, dan 2) Minimnya ruang partisipatif bagi KPM untuk terlibat dalam perencanaan. Akibatnya, musyawarah lokal jarang dilakukan sehingga internalisasi nilai dan kepemilikan terhadap program belum kuat, menjadikan perubahan yang terjadi bersifat eksternal dan berpotensi tidak berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan temuan Dushkova & Ivlieva (2024) yang menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat, jaringan antar-komunitas, dan integrasi pengetahuan lokal sebagai fondasi keberlanjutan pemberdayaan. Penelitian Ali et al. (2023) juga menegaskan bahwa modal sosial berupa kepercayaan, jaringan, dan kerja sama berperan penting dalam memperkuat proses perubahan di tingkat komunitas. Sementara itu, kajian manajemen perubahan yang mengadaptasi model Lewin menyoroti bahwa tahap “refreezing” hanya dapat tercapai melalui keterlibatan personal, komitmen, dan dukungan berkelanjutan. Dengan demikian, untuk memastikan perubahan yang lebih kokoh dan jangka panjang, diperlukan penguatan forum musyawarah lokal secara rutin, pelibatan KPM dalam desain program, serta pengembangan kapasitas kepemimpinan lokal agar komunitas mampu menjadi

penggerak sekaligus penjaga nilai-nilai baru yang telah dibangun.

3. Kontribusi gagasan dan perubahan.

Pendamping sosial di Kecamatan Bungaraya telah berperan aktif dalam menyampaikan laporan dan aspirasi masyarakat melalui forum koordinasi kabupaten dengan memanfaatkan sistem SIKS-NG sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas. Namun, kontribusi mereka masih bersifat operasional, terbatas pada penyampaian data dan keluhan tanpa diiringi analisis strategis berbasis data lapangan yang dapat memengaruhi kebijakan publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas strategis pendamping terutama dalam hal riset kebijakan, advokasi, dan refleksi kritis belum optimal, sehingga fungsi mereka sebagai agen advokasi kebijakan belum termaksimalkan.

Padahal, sebagaimana ditegaskan dalam studi oleh Sarjiyanto et al. (2026), pemberdayaan komunitas yang melibatkan agen perubahan dapat memperkuat modal psikologis, sosial, dan finansial masyarakat. Selaras dengan itu, literatur Majee et al. (2024) menyoroti pentingnya pengembangan kepemimpinan lokal yang adaptif terhadap konteks komunitas, sedangkan kajian (Sumardjo et al., 2023) menegaskan bahwa kolaborasi dan dialog berbasis data lokal merupakan fondasi transformasi sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, peran pendamping perlu diarahkan tidak hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai jembatan strategis antara komunitas dan kebijakan dengan memperkuat kapasitas riset-aksi, menciptakan ruang refleksi kolaboratif antara komunitas dan pemerintah, serta menghasilkan rekomendasi berbasis data lokal. Dengan demikian, proses perubahan sosial tidak sekadar diberikan dari luar, melainkan diciptakan bersama secara partisipatif sehingga nilai-nilai baru (refreezing) benar-benar terinternalisasi dan memperoleh legitimasi di tingkat komunitas.

Pembahasan Temuan

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu program strategis pemerintah Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga miskin, memperbaiki gizi masyarakat, serta memperkuat sistem perlindungan sosial. Sebagai program yang memerlukan perubahan pola distribusi bantuan dari tunai atau beras langsung (Rastra) menuju mekanisme non tunai berbasis kartu elektronik, implementasinya tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan perubahan sosial, budaya, dan psikologis

masyarakat penerima manfaat. Dalam konteks inilah peran pendamping sosial menjadi sangat vital. Mereka berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan pusat dan realitas lokal, sekaligus agen perubahan yang diharapkan mampu mengawal transisi agar berlangsung efektif dan berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pendamping sosial dalam implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bungaraya lebih menonjol pada tahap awal perubahan sosial sebagaimana diuraikan dalam model perubahan Lewin Lippitt, yaitu pada fase *unfreezing*. Namun, proses lanjutan berupa penguatan kapasitas (*changing*) dan pelembagaan perubahan (*refreezing*) masih menghadapi berbagai kendala.

1. Tahap *unfreezing*

Tahap *unfreezing* dalam konteks Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kecamatan Bungaraya merepresentasikan upaya pendamping sosial dalam mencairkan pola pikir lama masyarakat agar siap menerima perubahan kebijakan. Tahap ini diwujudkan melalui tiga strategi utama, yaitu: (a) verifikasi data penerima manfaat, yang memastikan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai dengan kriteria yang ditetapkan sehingga menumbuhkan legitimasi program; (b) komunikasi persuasif, yang bertujuan menjelaskan tujuan BPNT, mekanisme penggunaan kartu, serta manfaat jangka panjangnya untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan; dan (c) fungsi menjembatani informasi, di mana pendamping berperan sebagai saluran utama dalam menyampaikan kebijakan pemerintah pusat kepada masyarakat lokal.

Peran ini sejalan dengan temuan (Burnes, 2020) yang menegaskan bahwa tahap *unfreezing* menuntut perubahan persepsi dan sikap agar penerima manfaat siap menerima pola baru. Namun, kritik terhadap model Lewin menunjukkan bahwa keberhasilan tahap awal tidak menjamin keberlanjutan jika tidak diikuti fase berikutnya. keberhasilan *unfreezing* tidak otomatis menjamin keberlanjutan tanpa diikuti *changing* (penggerakan perubahan) dan *refreezing* (pemanjapan perubahan). Dalam penelitian ini, fase *changing* dan *refreezing* belum terkelola secara optimal, sehingga perubahan yang terjadi masih bersifat parsial dan administratif. Studi lain menuturkan bahwa komunikasi persuasif dan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan kesadaran akan kebutuhan perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa dialog horizontal dan pemberdayaan melalui keterlibatan langsung meningkatkan pengetahuan, persepsi, dan keterlibatan komunitas dalam proses perubahan (Abdullah et al., 2023). Sementara itu, studi review dalam pemberdayaan komunitas menegaskan bahwa keberhasilan transformasi sosial yang mencakup fase *unfreezing* tergantung pada keterlibatan aktif

masyarakat, jaringan kemitraan lintas pemangku kepentingan, dan tata kelola yang adaptif (Dushkova & Ivlieva, 2024). Namun demikian, kritik terhadap model Lewin yang juga diangkat dalam literatur Indonesia menunjukkan bahwa meskipun unfreezing berjalan, tanpa fase changing dan refreezing yang dikelola dengan baik maka perubahan akan bersifat parsial atau bersifat administratif saja (Prasojo et al., 2021).

Pada tahap ini mencerminkan upaya awal pendamping dalam membangun komunikasi, mengidentifikasi masalah riil, dan menciptakan kesadaran di tingkat komunitas mengenai pentingnya keterlibatan dalam program. Hal ini terlihat dari keterlibatan pendamping dalam proses verifikasi KPM, komunikasi persuasif untuk membangun kepercayaan, dan upaya menjembatani informasi antara kebijakan pemerintah dan warga. Pada fase *unfreezing*, pendamping menjalankan sejumlah langkah penting:

1) Diagnosa Kebutuhan nyata

Pendamping memulai dengan memverifikasi data KPM, mengidentifikasi masalah teknis seperti data ganda dan ketidaksesuaian identitas. Proses ini penting untuk memastikan ketepatan sasaran bantuan, tetapi masih bersifat administratif. Dimensi sosial-psikologis misalnya bagaimana KPM memaknai bantuan belum banyak digali. Padahal menurut Lippitt, Watson, dan Westley (1958), pemahaman motivasi, nilai, dan aspirasi warga merupakan bagian integral dari diagnosa perubahan.

2) Analisis motivasi

Pendamping menghadapi resistensi dari KPM yang datanya tidak valid. Respon yang diambil adalah komunikasi persuasif dan dialogis, suatu langkah yang mencerminkan pendekatan humanis. Akan tetapi, upaya ini belum berkembang ke arah *conscientization* (kesadaran kritis) sebagaimana dikemukakan (Freire, 1970), di mana warga diajak merefleksikan kondisi mereka secara kolektif.

3) Pemanfaatan sumber daya lokal

Pendamping berhasil mengaktifkan perangkat desa, agen e-Warong, dan sistem informasi kesejahteraan sosial (SIKS-NG). Hal ini sejalan dengan gagasan *collective efficacy* (Sampson, 2020), yang menekankan pentingnya kepercayaan dan kapasitas kolektif dalam mengelola sumber daya komunitas.

4) Penyesuaian bentuk bantuan

Layanan kunjungan rumah untuk kelompok rentan dan pelaporan digital merupakan strategi adaptif yang menunjukkan sensitivitas sosial pendamping. Strategi ini memperlihatkan kemampuan adaptasi terhadap kebutuhan nyata, walaupun masih berfokus pada penyelesaian teknis.

Fase ini menunjukkan keberhasilan relatif pendamping dalam menciptakan *trust* awal antara KPM, agen penyalur, dan pemerintah desa. Namun, pola partisipasi masih terbatas pada *tokenism* (Arnstein, 1969), karena keterlibatan warga sebatas menerima informasi atau konsultasi tanpa memiliki kendali substantif. Pendekatan awal dalam BPNT Bungaraya memperlihatkan kombinasi antara kekuatan administratif dan keterbatasan partisipatif. Di satu sisi, pendamping berhasil menjalankan fungsi teknis seperti verifikasi data, koordinasi kelembagaan, dan pelayanan adaptif. Namun, di sisi lain, peran mereka sebagai fasilitator perubahan sosial belum sepenuhnya tampak. Masih ada jarak antara diagnosa administratif dengan pemahaman mendalam tentang dinamika sosial-psikologis masyarakat. Dalam perspektif teori Kurt Lewin dan pengembangan Lippitt, kelemahan ini dapat dipahami sebagai belum optimalnya tahap unfreezing. KPM belum benar-benar menyadari pentingnya perubahan secara substantif, sehingga program cenderung dipandang sebagai instruksi dari luar, bukan sebagai hasil kesadaran kolektif. Jika kondisi ini berlanjut, keberlanjutan program akan sangat tergantung pada intervensi eksternal, bukan pada inisiatif lokal.

Untuk memperkuat pendekatan awal, pendamping sosial perlu mengintegrasikan aspek partisipasi, refleksi kritis, dan pemilihan objek strategis. Dengan begitu, BPNT tidak hanya menjadi program bantuan, tetapi juga instrumen pemberdayaan yang mampu mendorong masyarakat Bungaraya menuju transformasi sosial yang lebih berkelanjutan.

2. Tahap *Changing*.

Fase *changing* menuntut adanya penerapan praktik baru. Di Bungaraya, pendamping sosial berperan dalam: 1) Musyawarah teknis dengan perangkat desa untuk menentukan mekanisme distribusi bantuan melalui e-Warong. 2) Pendampingan langsung pada KPM yang mengalami kesulitan menggunakan kartu BPNT. 3) Koordinasi dengan agen e-Warong untuk memastikan stok pangan tersedia sesuai standar. Namun, peran pendamping lebih cenderung administratif dan teknis ketimbang transformasional. Minimnya pelatihan lanjutan, lemahnya dokumentasi

praktik baik, serta terbatasnya koordinasi lintas sektor membuat proses perubahan belum terstruktur.

Hal ini konsisten dengan literatur yang menyatakan bahwa model pemberdayaan yang paling tangguh adalah yang bukan hanya bergantung pada mekanisme administrasi, tetapi juga pada pengembangan kapasitas lokal, adaptasi terhadap konteks dan integrasi struktur kelembagaan yang kuat (Mustanir et al., 2025). Peran pendamping mulai mengarah pada penggerakan masyarakat, terutama dalam membantu menyusun langkah operasional distribusi bantuan dan mendorong kesadaran terhadap hak-hak KPM. Namun demikian, intervensi di tahap ini belum terstruktur secara sistemik dan masih bergantung pada inisiatif personal pendamping. Ketidadaan sistem evaluasi berbasis bukti serta lemahnya koordinasi lintas aktor (antara pendamping, agen e-warong, dan pemerintah desa) menjadi indikasi belum terbentuknya mekanisme perubahan yang kuat. Hal ini sejalan dengan pendapat Dushkova & Ivlieva (2024) bahwa salah satu hambatan utama keberlanjutan program pemberdayaan adalah lemahnya indikator evaluasi dan monitoring yang sistemik, dimana banyak program hanya menitikberatkan pada output jangka pendek dan belum memiliki mekanisme yang terstruktur untuk mengecek perubahan berbasis data aktual. Hal ini selaras dengan kondisi di Bungaraya, di mana sistem evaluasi berbasis bukti belum terbentuk sehingga meskipun intervensi terjadi, pengukuran dan pembelajaran dari perubahan belum optimal. Fase *changing* ditandai dengan penggerakan masyarakat ke arah perubahan yang lebih konkret. Dalam penelitian ini, peran pendamping lebih menonjol dalam aspek teknis ketimbang aspek strategis:

1) Penguatan hubungan dengan aktor kunci.

Pendamping membangun kedekatan dengan agen e-Warong, yang menjadi mitra utama dalam distribusi bantuan. Hubungan ini menghasilkan alur koordinasi yang lancar dan kepercayaan dua arah. Namun, jejaring informal seperti tokoh adat, ketua RT, atau pemuka agama belum banyak dilibatkan. Padahal penelitian Bagnall et al. (2024) menegaskan bahwa keberhasilan perubahan sosial dan pemberdayaan masyarakat sangat tergantung pada koordinasi lintas sektor yang baik antara pemerintah, masyarakat, lembaga swasta, dan kelompok komunitas.

2) Menumbuhkan kesadaran sosial

Pendamping mencoba meningkatkan kesadaran KPM terkait hak-hak mereka. Akan tetapi, peran ini belum berlangsung secara merata, terutama dalam

masa transisi dari bantuan barang ke tunai. Pendamping cenderung fokus pada distribusi teknis ketimbang membangun ruang refleksi kolektif yang dapat menumbuhkan kesadaran kritis.

3) Mobilisasi sumber daya

Upaya musyawarah dengan perangkat desa dalam menentukan mekanisme distribusi menunjukkan adanya peran fasilitasi, tetapi masih belum terstruktur. (Dogherty et al., 2012) menyebutkan bahwa fasilitator ideal berfungsi sebagai *mediator*, *mobilizer*, dan *resource person*. Dalam konteks Bungaraya, peran mobilizer masih lemah akibat minimnya pelatihan dan lemahnya sistem dokumentasi. Dengan demikian, fase *changing* memperlihatkan bahwa pendamping mampu menggerakkan komunitas pada level teknis, tetapi belum mengarah pada mobilisasi strategis untuk perubahan sosial jangka panjang.

3. Fase *Refreezing*

Adapun pada fase *refreezing*, yaitu pemantapan hasil perubahan melalui kerja sama jangka panjang dan institusionalisasi proses pendampingan, peran pendamping tampak belum berkembang secara optimal. Minimnya dokumentasi hasil evaluasi, tidak adanya upaya formalisasi pembelajaran bersama, serta lemahnya integrasi peran pendamping dalam perencanaan jangka panjang program menunjukkan bahwa perubahan yang telah dimulai belum dikonsolidasikan menjadi sistem yang berkelanjutan.

Temuan ini memperkuat argumen Mardikanto & Soebiato (2017) bahwa fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai aktor transformatif yang mampu menciptakan relasi horizontal dan partisipatif dengan masyarakat. Pendamping sosial memiliki potensi untuk menjalankan fungsi edukatif dan persuasif secara simultan, namun hal tersebut membutuhkan dukungan sistemik dari lembaga pelaksana program dan pemangku kebijakan daerah. Berdasarkan kerangka perubahan Lewin–Lippitt, peran pendamping sosial di Kecamatan Bungaraya masih dominan pada tahap *unfreezing* dan sebagian tahap *changing*, tetapi belum optimal pada tahap *refreezing*. Dengan kata lain, pendamping telah berhasil menggugah kesadaran awal dan membangun komunikasi, namun belum mampu mengonsolidasikan perubahan menjadi sistem yang berkelanjutan.

Fase *refreezing* seharusnya memastikan bahwa nilai, perilaku, dan sistem baru

terinstitusionalisasi. Dalam penelitian ini, fase ini justru menjadi titik lemah:

1) Kerja sama dengan aktor formal–informal

Kolaborasi dengan Dinas Sosial dan bank penyalur sudah terjalin, tetapi dominan administratif. Minimnya keterlibatan tokoh informal menyebabkan lemahnya legitimasi sosial program. Hal ini sesuai dengan kerangka teori institusionalisasi di mana perubahan harus melibatkan dimensi formal dan informal untuk benar-benar menjadi bagian dari struktur sosial. Fase refreezing dijelaskan sebagai fase untuk menanamkan perilaku, proses, dan pola pikir baru ke dalam tatanan (struktur formal dan informal) yang ada, dengan memastikan keberlanjutan melalui penguatan dan pemberian penghargaan(Nudin et al., 2024). Karena itu, kurangnya keterlibatan tokoh informal (pemuka adat, ketua RT/RW) dalam Bungaraya berpotensi menghambat proses internalisasi nilai baru dan membuat perubahan tetap dirasakan sebagai program eksternal daripada hak milik masyarakat.

2) Perencanaan perubahan berkelanjutan

Pendamping menyadari adanya kelemahan sistem, tetapi keterbatasan ruang partisipatif membuat strategi jangka panjang sulit dirancang. Tidak adanya forum musyawarah reguler dengan KPM atau tokoh desa memperlemah fungsi fasilitator sebagai arsitek perubahan. Dushkova & Ivlieva (2024) menyebutkan bahwa institutional change yang berkelanjutan memerlukan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan mekanisme yang memperkuat kontrol komunitas terhadap proses yaitu tidak hanya intervensi sesaat namun juga adaptasi dan ekspansi sistem baru. Tanpa mekanisme partisipatif yang kuat dan forum reguler untuk refleksi bersama, nilai baru sulit untuk menjadi norma dan struktur yang mapan. Hal ini juga sejalan dengan teori bahwa fase refreezing bukan sekadar penetapan prosedur baru, melainkan internalisasi nilai, rutinitas, dan mekanisme penguatan yang sistemik(Mwangi & Lubasi, 2017).

3) Kontribusi gagasan strategis

Aspirasi warga telah disampaikan melalui forum kabupaten, namun sifatnya masih operasional. Potensi pendamping sebagai agen advokasi berbasis data belum tergarap optimal. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan struktur kebijakan lokal belum terjadi secara substansial. Dalam sebuah Literatur menegaskan bahwa untuk perubahan institusi yang bermakna, aktor lokal harus

memiliki kapasitas untuk menghasilkan gagasan strategis, mengubah norma, aturan, dan praktik, bukan hanya menjalankan tugas administratif (Strasser et al., 2019). Dengan kata lain, refreezing gagal optimal jika sistem advokasi lokal, dokumentasi praktik baik, dan pembelajaran dari lapangan tidak berkembang menjadi struktur yang lebih kuat.

Dalam konteks ini, penelitian ini mengungkapkan bahwa pendamping sosial bukan sekadar sebagai teknokrat lapangan, tetapi sebagai katalisator perubahan sosial yang memiliki nilai strategis dalam kebijakan perlindungan sosial. Pendekatan menggunakan teori perubahan sosial Lewin–Lippitt memberikan dimensi analitis yang mendalam untuk mengkaji proses pendampingan secara dinamis, bukan hanya dari aspek administratif, tetapi juga dari sisi relasi sosial, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan transformasi. Dengan demikian, pendekatan teoritik ini membuka ruang baru untuk mendesain pelatihan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pendamping sosial secara lebih sistemik dan berbasis bukti (*evidence-based facilitation*), guna memastikan bahwa mereka benar-benar mampu menjadi agen perubahan dalam program sosial yang bersifat massif dan struktural seperti BPNT. Peran pendamping sosial dalam implementasi BPNT di Bungaraya cenderung menonjol pada fase awal perubahan (*unfreezing*) dan sebagian fase *changing*, tetapi belum berlanjut optimal pada fase *refreezing*. Beberapa faktor yang menjadi penyebab kelemahan tersebut adalah:

1. Dominasi pola top-down dalam penentuan objek perubahan, sehingga pendamping lebih banyak mengikuti arahan pusat daripada menginisiasi partisipasi lokal.
2. Minimnya ruang partisipatif yang memungkinkan warga, khususnya KPM, terlibat sebagai subjek aktif dalam pengambilan keputusan.
3. Lemahnya dukungan kelembagaan, baik berupa dokumentasi sistematis, pelatihan berkelanjutan, maupun koordinasi lintas aktor yang lebih luas.

Namun, di balik keterbatasan tersebut, novelty penelitian ini menegaskan penggunaan perspektif Lewin–Lippitt, penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa keberhasilan teknis pendamping tidak cukup jika tidak disertai konsolidasi sosial dan pelebagaan nilai baru. Dengan kata lain, penelitian menegaskan bahwa pendamping sosial di Bungaraya saat ini lebih berfungsi sebagai katalisator awal perubahan, tetapi untuk dapat berkembang menjadi arsitek perubahan yang berkelanjutan, diperlukan

dukungan sistemik, penguatan kapasitas berbasis teori perubahan, serta ruang partisipatif yang lebih terbuka bagi masyarakat.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendamping sosial memiliki peran strategis dalam implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bungaraya, namun peran tersebut belum sepenuhnya optimal dan berkelanjutan. Berdasarkan kerangka perubahan sosial Lewin Lippitt, peran pendamping tampak menonjol pada tahap *unfreezing*, yaitu dalam membangun kesadaran awal, komunikasi, dan identifikasi masalah riil di masyarakat. Sebagian pendamping juga telah memasuki tahap *changing*, melalui upaya penggerakan masyarakat dan koordinasi teknis pelaksanaan program. Namun demikian, pada tahap *refreezing* yang menuntut adanya institusionalisasi praktik baik, kerja sama lintas aktor secara berkelanjutan, serta sistem evaluasi berbasis bukti peran pendamping masih minim. Hal ini mengindikasikan bahwa transformasi sosial yang diinisiasi belum terkonsolidasi menjadi perubahan struktural yang berkelanjutan. Temuan ini memperkuat pentingnya menempatkan pendamping sosial bukan hanya sebagai pelaksana administratif program, tetapi sebagai aktor transformatif yang mampu mendorong partisipasi, membangun relasi horizontal, dan mengarahkan proses pemberdayaan berbasis keadilan sosial. Pendekatan teoritik Lewin Lippitt dalam penelitian ini memberikan kontribusi metodologis baru dalam menilai efektivitas pendampingan sosial, serta membuka ruang untuk pengembangan model pelatihan dan evaluasi kinerja pendamping secara lebih sistemik, terstruktur, dan kontekstual.

Referensi

- Abdullah, S., Sarwoprasodjo, S., & Hapsari, D. R. (2023). Participatory Communication to Strengthen Farmers' Empowerment and Adaptation in Facing the Impacts of Climate Change. *HABITAT*, 34(3), 245–255.
- Ali, A., Salman, D., Agustang, A., Ahmad, J., Saleh, S., & Kamaruddin, S. A. (2023). Social capital and community empowerment: towards sustainable agricultural. *Universal Journal of Agricultural Research*, 11(2), 380–388.
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Bagnall, A.-M., South, J., Jones, R., & Southby, K. (2024). *Multisector collaboration to improve community wellbeing: pre-pandemic evidence review*.
- Burnes, B. (2020). The origins of Lewin's three-step model of change. *The Journal of*

- Applied Behavioral Science*, 56(1), 32–59.
- Cleveland, M., & Cleveland, S. (2018). Building Engaged Communities—A Collaborative Leadership Approach. *Social Sciences*, 7(12), 260. <https://doi.org/10.3390/socsci7120260>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Denzin, N. K. (2008). *Strategies of qualitative inquiry* (Vol. 2). Sage.
- Dogherty, E. J., Harrison, M. B., Baker, C., & Graham, I. D. (2012). Following a natural experiment of guideline adaptation and early implementation: a mixed-methods study of facilitation. *Implementation Science*, 7(1), 9.
- Dushkova, D., & Ivlieva, O. (2024). Empowering communities to act for a change: A review of the community empowerment programs towards sustainability and resilience. *Sustainability*, 16(19), 8700.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. Herder and Herder.
- Haris, M. (2019). Problematika Pemberdayaan Masyarakat Miskin. *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 2(1), 46–63.
- Laksana, B. I., Haris, M., Saifunnajar, S., & Yefni, Y. (2025). Musyawarah Sebagai Upaya Penguatan Modal Sosial. *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 8(1), 157–180.
- Lestari, A., Anggara, I. P., & Anita, E. (2024). Multi-Sector Collaboration in Community Empowerment: Study on the Partnership between the Regional Government and the Community Empowerment Institution LPM Sriwijawa. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 245–254. <https://doi.org/10.33506/jn.v10i1.3452>
- Lewin, K. (1947). Frontiers in Group Dynamics. In *Human Relations* (Vol. 1, Issue 1).
- Liberato, S. C., Brimblecombe, J., Ritchie, J., Ferguson, M., & Coveney, J. (2011). Measuring capacity building in communities: a review of the literature. *BMC Public Health*, 11(850). <https://doi.org/10.1186/1471-2458-11-850>
- Lippitt, R., Watson, J., & Westley, B. (1958). *The Dynamics of Planned Change*. Harcourt, Brace & World.
- Majee, W., Massengale, S. H., Rippel, C., & Adams, J. R. (2024). *11 Community Leadership Development*.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Mustanir, A., Sellang, K., Adnan, A. A., & Lubis, S. (2025). Tracing the Evolution of Community Empowerment Models in Development Planning. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 28(3), 400–427.

- Mwangi, J. K., & Lubasi, R. (2017). *Organization Preparedness to Change and Employees' Commitment: Case of the African Development Bank in Kenya*.
- Nudin, B., Salsabil, S., Zainuddin, N., Septianto, M. E., Husain, A. M., & Saputra, N. (2024). Implementation of Change Management in Shaping Student Character in the MAPK Program at MAN 1 Yogyakarta. *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 9(1), 92–111.
- Polko, A., Ochojski, A., & Czornik, M. (2025). Leadership in Urban Commoning: Why Bridging Social Capital Matters? *International Journal of the Commons*, 19(1).
- Prasojo, E., Putri, M., & Hariyati, D. (2021). Unfreezing without Refreezing Change Management: Dilemmatic Roles of Agents in Succeeding the Bureaucracy Reform. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(1), 1–18.
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77–84.
- Sampson, E. L. (2020). Empowering Better End-of-Life Dementia Care (EMBED-Care): A mixed methods protocol to achieve integrated person-centred care across settings. *International Journal of Geriatric Psychiatry*, 35(8), 820–832. <https://doi.org/10.1002/gps.5251>
- Sarjiyanto, S., Sarwoto, S., Dio, P. E., Kadir, J. A., & Firdaus, R. B. R. (2026). The Role of Community Empowerment as Mediator on the Relationship Between Psychological, Social, and Financial Capital on Rural Community Well-Being. *Journal of Population and Social Studies [JPSS]*, 34, 99–117.
- Strasser, T., de Kraker, J., & Kemp, R. (2019). Developing the transformative capacity of social innovation through learning: A conceptual framework and research agenda for the roles of network leadership. *Sustainability*, 11(5), 1304.
- Sumardjo, S., Firmansyah, A., & Dharmawan, L. (2023). Social transformation in peri-urban communities toward food sustainability and achievement of SDGs in the era of disruption. *Sustainability*, 15(13), 10678.
- Tarom, M., & Aksuo, M. (2025). Local Elites as Collaborative Networks: A Systematic Literature Review Analysis of Their Capabilities and Roles in Regional Development. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 10(2), 109–113.